

**Membina Karakter Aktivistis Mahasiswa
Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
(Studi Kasus Terhadap Aktivitas Mahasiswa di Universitas Timor)**

Adriana Kolo¹, Asep Ikbal²,

koloadriana1991@gmail.com¹, ikbalasep472@gmail.com²,

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor¹,

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan UPR²

Abstract

This research is motivated by the development of student activism, especially at the University of Timor, East Nusa Tenggara. One of the manifestations of the activities of student activists can be seen from the demonstrations of students carrying campus attributes and alma maters. Demonstrations that are actually the mouthpiece of democracy become less than perfect when they are colored by unethical actions when expressing their aspirations, such as using harsh words, violating demonstration rules and destroying public facilities. The people really expect the role of students but not with unethical actions, so it is the duty of the campus to foster the character of student activists to become plenary students. This study tries to explain the role of Citizenship Education courses in fostering the character of student activists at the University of Timor. Literacy studies and case studies were chosen as methods in this research so that they can find the formulation of the coaching model. This study uses a qualitative approach so that it can find facts in depth through interviews, observations and literacy studies as a comparison of character building for student activists as well as elaborating an appropriate model to cultivate the character of students who have Pancasila democracy

Keywords: *Citizenship Education, Student Activists, Development, Democracy*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan aktivisme mahasiswa khususnya di Universitas Timor Nusa Tenggara Timur. Salah satu perwujudan dari aktivitas para aktivis mahasiswa dapat dilihat dari adanya demonstrasi para mahasiswa yang membawa atribut dan almamater kampus. Demonstrasi yang sejatinya menjadi corong demokrasi menjadi kurang sempurna manakala diwarnai dengan tindakan-tindakan yang kurang etis saat menyampaikan aspirasi, misalnya penggunaan kata-kata yang kasar, melanggar aturan berdemonstrasi hingga merusak fasilitas umum. Rakyat sangat mengharapkan peranan mahasiswa namun tidak dengan tindakan yang kurang etis, sehingga menjadi tugas kampus untuk membina karakter para aktivis mahasiswa agar menjadi mahasiswa paripurna. Penelitian ini mencoba menjelaskan peranan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina karakter aktivis mahasiswa di lingkungan Universitas Timor. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan studi literasi sehingga dapat menemukan formulasi model pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat menemukan fakta-fakta secara mendalam yang dilakukan melalui wawancara, observasi hingga studi literasi sebagai perbandingan pembinaan karakter aktivis mahasiswa serta mengelaborasi suatu model yang tepat untuk menumbuhkan karakter mahasiswa yang berdemokrasi Pancasila.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Aktivitas Mahasiswa, Pembeinaan, Demokrasi

PENDAHULUAN

Universitas Timor (Unimor) menjadi salah satu kampus unggul terutama di Indonesia Timur. Keunggulannya bukan hanya terletak pada prestasi akademik yang mengalami peningkatan, namun juga pada partisipasi mahasiswa yang banyak aktif dalam kehidupan organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Keterlibatan mahasiswa pada setiap perubahan bangsa akan selalu kita temui dalam tonggak sejarah bangsa ini, karena pada dasarnya mahasiswa memiliki tugas atau beban moral khusus yang harus ditanggungnya.

Menurut (Siallagan, 2011), mahasiswa sebagai masyarakat kampus mempunyai tugas utama yaitu belajar seperti membuat tugas, membaca buku, buat makalah, presentasi, diskusi, hadir ke seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bercorak kekampusan. Di samping tugas utama, ada tugas lain yang lebih berat dan lebih menyentuh terhadap makna mahasiswa itu sendiri, yaitu sebagai agen perubah dan pengontrol sosial masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang setia mencarikan solusi berbagai problem yang sedang mereka hadapi.

Sedangkan menurut Cahyono mengemukakan bahwa mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting, antara lain sebagai *guardian of value*, *agent of change*, *moral force* dan *social control*. Dari berbagai pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa mahasiswa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga adanya aktivitas mahasiswa berupa diskusi, seminar, kajian,

demonstrasi dan sejenisnya merupakan sensitivitas mahasiswa dalam merasakan kondisi publik, artinya bahwa jika mahasiswa sudah bergerak artinya ada yang sedang tidak baik-baik saja dengan negara ini. (Cahyono, 2008).

Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan. (Siregar, 1994) Namun urgensi partisipatif mahasiswa harus tegak lurus dengan peranan mahasiswa sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang sekaligus karakter mahasiswa itu sendiri. Tidak bisa mahasiswa berjuang untuk rakyat dengan cara-cara yang salah atau tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.

Akhir-akhir ini, tersiar berita yang kurang menyenangkan datang dari demo anarkis mahasiswa Universitas Timor saat melakukan demonstrasi, yakni berdemo dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar serta merusak fasilitas umum (link video di daftar pustaka). Secara global demonstrasi mahasiswa yang diwarnai dengan kekerasan verbal maupun non verbal banyak terjadi di berbagai wilayah, sehingga permasalahan perilaku yang kurang etis dari oknum aktivis mahasiswa buka hanya menjadi masalah lokal namun menjadi masalah nasional bahkan global. Sehingga penulis mencoba untuk menjadikan kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Timor Timur Utara (TTU) sebagai contoh kasus yang mungkin pada akhirnya studi ini dapat dipergunakan pada lokasi lainnya.

Meskipun mahasiswa ikut berdemonstrasi tidak melulu soal

penyampaian aspirasi dari rakyat atau kegelisahan dari mahasiswa itu sendiri, misalnya saja terdapat fenomena narsisme yang berkembang pada dunia mahasiswa di mana mereka ikut demonstrasi hanya demi konten yang diunggah di media sosial miliknya, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syahrul Jiwandono (2020). Sorokowski (2017), menjelaskan bahwa intensitas mengunggah foto di media sosial berhubungan dengan *exhibitionism* yang merupakan salah satu aspek dari narsisme. *Exhibitionism* adalah seseorang yang senang ketika memamerkan segala kelebihanannya dengan orang lain seperti penampilan fisik, status sosial, dan harta benda yang dimilikinya. Penampilan fisik, status sosial, dan harta seseorang dapat dengan mudah memamerkannya dengan mengunggah fotonya di media sosial. Mahasiswa yang memiliki sifat narsis tidak hanya yang gemar memotret diri sendiri lalu mengunggahnya di media sosial, akan tetapi juga gemar membanggakan diri sendiri pada orang lain.

Dua latar belakang mengenai mahasiswa yang anarkis saat melakukan demonstrasi dengan mahasiswa yang ikut berdemonstrasi pada akhirnya akan menimbulkan suatu konsekuensi berupa tingkat kepercayaan masyarakat atau integritas dari mahasiswa sendiri sebagai agen perubahan akan menurun, oleh karena itu penulis berpikir sangat perlu untuk membuat suatu kajian mengenai peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai media pembinaan karakter mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi “dibebani” oleh harapan-harapan untuk terciptanya generasi bangsa

yang berkarakter. Dalam membatasi pengertian dari PKn itu, Numan Somantri memberikan batasan pengertian PKn yang dirumuskan sebagai suatu seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan Pendidikan IPS. Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa dalam tataran konseptual, PKn diartikan juga sebagai penyiapan generasi-generasi muda untuk difokuskan menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan sebagai pedoman dalam berpartisipasi di masyarakat (Samsuri, 2011).

Kriteria warga negara muda yang memiliki kecakapan, pengetahuan, dan nilai-nilai menjadi salah satu pencapaian dari diberikannya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis. Untuk itu PKn dituntut dapat mengembangkan kelas sebagai laboratorium demokrasi yang menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Dengan demikian mata pelajaran PKn merupakan proses yang meliputi semua pengaruh positif yang dimaksudkan untuk membentuk pandangan seorang warga negara dalam peranannya di dalam masyarakat (Cholisin, 2000).

Kelas yang berfungsi sebagai laboratorium demokrasi menjadi salah satu peluang untuk memupuk karakter para

mahasiswa khususnya para aktivis mahasiswa. Salah satu misi PKn menurut (Winarno, 2006) sebagai pendidikan yang demokratis berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, asumsi dasar yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa aktivis mahasiswa yang melakukan vandalisme/pengerusakan terhadap fasilitas umum serta menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya pada saat melakukan demonstrasi merupakan suatu bentuk belum dimilikinya kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai rakyat khususnya aktivis mahasiswa. Jika pun mereka diasumsikan sudah mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka kemungkinan lainnya mereka memiliki kesadaran yang rendah untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

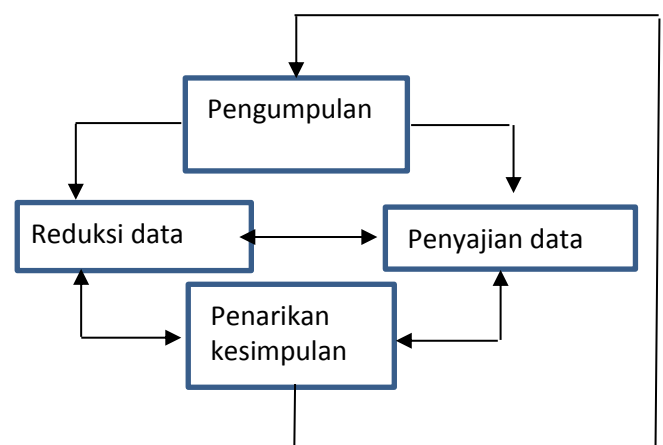
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki asumsi yang kuat tentang peranan yang dimiliki oleh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam memberikan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara khususnya para aktivis mahasiswa, sehingga pada akhirnya diharapkan para aktivis mahasiswa dalam melakukan aksi demonstrasi dapat memegang nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan falsafah bangsa kita yakni demokrasi Pancasila yang mengedepankan persatuan serta saling menghargai satu sama lain.

METODE

Pendekatan kualitatif dipilih sebagai pendekatan pada penelitian ini dengan alasan tidak terbatasnya pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan studi kasus yang hasil studi kasusnya merupakan generalisasi dari pola kasus yang khas dari individu, kelompok atau institusi (Nazir, 2011) Lokasi penelitian ini adalah Universitas Timor yang terletak di Kabupaten Timor Timur Utara, Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini, metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai teknik pengumpulan data primer dan dilakukan juga studi literasi sebagai tambahan referensi serta menjadi bahan komparasi dan validasi penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut sangat penting untuk memilah data, mempertajam data dan mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan penelitian.

Berikut ini bagan alur penelitian:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap gejala vandalisme, penggunaan kata-kata kasar maupun narsisme yang terjadi pada para aktivis mahasiswa. Pertama bahwa gejala-gejala tersebut muncul dalam gerakan mahasiswa khususnya aktivis mahasiswa Universitas Timor karena belum dewasanya mentalitas beberapa aktivis mahasiswa yang menjadi demonstran. Belum matangnya aspek emosional menyebabkan mahasiswa tertentu melampaui batas-batas yang seharusnya atau dengan kata lain lepas kontrol (*out of control*). Ada dua pendapat yang bersebrangan mengenai korelasi usia dengan kematangan emosi. Satu pihak mengemukakan bahwa usia mempengaruhi kematangan emosi seseorang sedangkan pendapat lain menganggap usia tidak berkaitan erat dengan kematangan emosi seseorang.

Misalnya saja pendapat dari Walgito yang mengatakan bahwa kematangan emosi berkaitan erat dengan usia seseorang dimana seseorang diharapkan akan lebih matang emosinya dan individu akan lebih menguasai atau mengendalikan emosinya, namun tidak berarti bahwa seseorang bertambah usianya berarti dapat mengendalikan emosinya secara otomatis. Walgito (2004), menganggap bahwa kematangan emosi tidak berhubungan dengan kematangan fisik karena hal tersebut berbeda dan mereka memaknai kematangan emosi sebagai seberapa baik seorang individu dapat menanggapi suatu situasi yang sedang dihadapinya, mengendalikan emosi dan berperilaku dewasa ketika berhadapan dengan orang lain. Kematangan emosi pada dasarnya mengendalikan emosi

individu daripada membiarkan emosi mengontrol individu.

Meskipun dua pendapat tersebut bersebrangan, namun peneliti menyimpulkan bahwa belum matangnya emosi pada diri seseorang termasuk aktivis mahasiswa itu dapat terjadi. Hal ini dapat menjadi kesimpulan awal manakala peneliti mengamati bahwa tidak semua aktivis mahasiswa bahkan mayoritas tidak melakukan tindak perusakan fasilitas umum maupun menggunakan kata-kata kasar saat melakukan demonstrasi, artinya gejala ini hanya terjadi secara parsial dan kita tidak bisa mengatakan bahwa semua aktivis mahasiswa mengalami keterlambatan/belum memiliki kematangan emosi.

Penemuan lain dari penelitian yang dilakukan bahwa tindakan pengrusakan dan penggunaan kata-kata kasar yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat berdemonstrasi tiada lain karena melihat contoh atau “meneladani” senior tertentu ketika berdemonstrasi, artinya bahwa secara tidak langsung terjadi transformasi pola dan teknik berdemonstrasi yang salah. Dalam melihat masalah ini secara lebih mendalam, maka peneliti mewawancarai beberapa aktivis mahasiswa yang juga sering mengikuti kegiatan demonstrasi. Beberapa narasumber mengemukakan bahwa seringkali senior mereka memberikan contoh-contoh yang kurang baik, seperti mengajarkan mengenai chaos dalam berdemonstrasi, berani berkelahi dengan petugas serta menganggap bahwa menggunakan kata-kata kasar dan merusak fasilitas umum sebagai manifestasi dari keberanian mereka sebagai mahasiswa.

Adapula beberapa mahasiswa yang lain mengatakan bahwa pernah dimknta

oleh senior saat berdemonstrasi untuk berorasi, meskipun tidak diperintahkan untuk berorasi dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Dari dua pernyataan tersebut akhirnya penullis dapat memahami bahwa saat senior mahasiswa melakukan pengkaderan tidak jarang juga salah dalam melakukannya terutama dalam hal demonstrasi, meskipun tidak semua senior salah, namun pada prinsipnya kesalahan ini terjadi pada golongan senior dan junior aktivis mahasiswa khususnya di kampus Universitas Timor.

Penyimpangan para demonstiran terutama saat melakukan pengrusakan atau melakukan tindakan anarkis lainnya bukan hanya disebabkan oleh senioritas dalam organisasi atau belum matangnya emosi seorang aktivis mahasiswa, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2002), yang mengemukakan bahwa setidaknya terdapat sembilan penyebab terjadinya demonstrasi anarkis yakni, ketidakpercayaan masyarakat, mahasiswa dan kelompok lainnya terhadap hukum, adanya provokasi, adanya kelompok terorganisir yang memiliki kepentingan, cara berpikir demonstiran yang menyimpang, faktor psikologis, faktor pengamanan yang kurang, kurangnya koordinasi antara demonstiran dan aparaturnegara, rendahnya pengendalian masa oleh aparat keamanan serta keinginan masa atau demonstiran yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan studi yang dikemukakan di atas, maka pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi beberapa aktivis mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dengan cara-cara anarkis. Dari kesemua faktor di atas, penulis dapat mengklasifikasikan faktor yang menyebabkan aktivis mahasiswa

menggunakan kata-kata kasar serta melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum atau fasilitas negara. Yang pertama adalah masih minimnya pengetahuan atau rendahnya kesadaran mengenai cara-cara berdemonstrasi yang baik atau konstitusional. Hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan atau pembinaan yang harus dilakukan baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi.

Kedua adalah hilang atau menurunnya kepercayaan aktivis mahasiswa kepada pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Ketidakpercayaan (*distrust*) kepada pemerintah seringkali menghasilkan demonstrasi yang bersifat anarkis. Dalam sejarah misalnya kita dapat melihat bahwa revolusi sebagai perubahan besar-besaran selalu diwarnai dengan kerusuhan saat demonstrasi, artinya bahwa masa aksi tidak lagi melihat konstitusi atau peraturan sebagai instrumen hukum yang harus ditaati. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Anarki” berarti hal yang tidak ada perintah, undang-undang, peraturan atau ketertiban dan kekacauan dalam suatu negara. Sedangkan “Anarkis” memiliki makna penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis. Anarkisme merupakan suatu perbuatan yang tidak asing dan berkaitan dengan pelaksanaan demonstrasi. Anarkisme sendiri mengandung pengertian penggunaan kekerasan baik secara terbuka atau tertutup dan bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002).

Sedangkan kelompok ketiga adalah mahasiswa yang terprovokasi. Provokator seringkali muncul dalam demonstrasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Penulis sebagai mantan aktivis mahasiswa yang juga pernah mengikuti beberapa kali aksi demonstrasi. Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan tersebut, beberapa kali selalu ada penyusup yang masuk sehingga memprovokasi masa aksi dan akhirnya terjadilah chaos. Padahal sejak *breafing* atau konsolidasi menjelang rapat, seluruh masa aksi sepakat untuk tidak melakukan chaos apalagi hingga bentrok dengan petugas. Artinya bahwa ada satu waktu di mana kondisi menjadi diluar kontrol. Padahal pada prinsipnya demonstrasi bukanlah untuk tercipta suasana kacau namun untuk menyampaikan pendapat.

(Sari & Siahainenia, 2015) mengungkapkan bahwa Demonstrasi memanfaatkan ruang publik atau dipahami sebagai ‘ruang sosial’ yang terbuka dan, di mana dalam ruang ini masyarakat dapat menyampaikan pendapat atau mengekspresikan dirinya secara bebas dan bertanggungjawab tanpa ada tekanan atau pemaksaan oleh siapapun. Ruang tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat agar memiliki akses dan peluang untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan temuan di atas, maka secara sederhana, penulis dapat menyajikan dalam tabel berikut ini:

	Faktor Penyebab	Alternatif Solusi
	Minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran	Internalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila melalui Mata

Penyebab Terjadinya Tindakan Anarkis Pada Demonstrasi Mahasiswa	aktivis mahasiswa dalam melakukan demonstrasi yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan lainnya	Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
	Tingginya rasa tidak percaya aktivis mahasiswa terhadap integritas pemerintah, sehingga anarkisme dianggap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan .	Kampus dapat menumbuhkan optimisme para aktivis mahasiswa mengenai masalah kebangsaan serta mengarahkan daya kritis mahasiswa melalui cara-cara yang dibenarkan
	Adanya faktor eksternal yang menyebabkan anarkisme atau chaos pada saat demonstrasi yakni adanya provokasi.	Peningkatan keamanan dan koordinasi masa aksi dengan aparat keamanan agar dapat meminimalisir terjadinya provokasi dalam demo

		yang sedang berlangsung.
--	--	--------------------------

Tabel 1 : Penyebab Demonstrasi Mahasiswa Anarkis

Data diolah oleh peneliti tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka ada dua faktor utama yang dapat diupayakan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yakni faktor minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran aktivis mahasiswa mengenai demonstrasi yang sesuai nilai-nilai Pancasila serta tingginya rasa tidak percaya aktivis mahasiswa terhadap integritas pemerintah, sehingga anarkisme dianggap sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Pendekatan penanaman nilai-nilai demokratis melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama adalah melalui kurikulum (*by curriculum*). Metode ini sangat merujuk pada kurikulum perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau yang lazim kita sebut dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kedua melalui program khusus yang disisipkan pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (*hidden curriculum*).

Dalam menumbuhkan kesadaran dan memberikan pengetahuan aktivis mahasiswa mengenai demonstrasi yang konstitusional, maka Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan secara aktif dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut. Hal itu dapat dilihat dari muatan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ada beberapa materi yang sangat berkaitan untuk menumbuhkan kesadaran tentang demokrasi konstitusional yang diwujudkan dalam demonstrasi, yakni Identitas

nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter, Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, UUD 1945 dan ketentuan perundang-undangan di bawah UUD, Kewajiban dan hak Negara dan warganegara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan Penegakan hukum yang berkeadilan.

Meskipun rancangan pembelajaran semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di setiap kampus berbeda, namun kurang lebih secara substansi akan sama dan penulis menggunakan RPS yang memang dirancang untuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Timor, sehingga dapat secara langsung diimplementasikan dalam kajian ini. Melalui materi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter dapat menjadi pengetahuan awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui identitas nasional. Salah satu penyebab rendahnya kesadaran mahasiswa aktivis terhadap nilai yang berlaku karena kurangnya mengenal identitas nasional, sehingga dirinya tidak mencerminkan karakter kebangsaan dengan baik.

Materi UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hak dan kewajiban warga negara menjadi pengetahuan yang sangat penting untuk dapat dikuasai khususnya oleh para aktivis mahasiswa. Dalam materi ini, dosen dapat melakukan suatu model pembelajaran seperti studi kasus atau role playing sehingga mahasiswa dapat lebih

memahami dan meresapi mengenai pentingnya menghargai hak orang lain dan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Adapun materi demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dapat dikembangkan sebagai suatu langkah dalam mendemokratisasi pikiran mahasiswa yang berpeluang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dalam melakukan internalisasi nilai dan karakter kepada para aktivis mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan agar berjalan lebih efektif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai acuan.

Pertama yakni dosen harus mengetahui mana saja mahasiswa yang pernah melakukan demonstrasi anarkis atau menggunakan kata-kata kasar atau dengan kata lain ada yang ditargetkan dalam melakukan penelitian ini, hal ini sangat penting karena pengetahuan dosen terhadap mahasiswa yang dimaksudkan akan mendapatkan hasil yang lebih efektif. Sebagai satu ilustrasi misalnya dosen akan melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam suatu pembelajaran, misalnya role playing, maka ketepatan memilih orang akan lebih efektif daripada memilih mahasiswa yang tidak pernah berdemo dengan menggunakan kata-kata kasar atau melakukan tindakan pengrusakan.

Kedua adalah melibatkan mahasiswa aktivis yang menjadi target. Proses melibatkan aktivis mahasiswa ini sangatlah diperlukan misalnya untuk mengemukakan pendapat tentang demokrasi yang kebablasan seperti demo secara anarkis, maka dosen dapat menagih persepsi atau pandangan mahasiswa yang melakukan tindakan “menyimpang”

tersebut. Dari sana juga kita dapat menganalisis bahwa apakah mahasiswa tersebut dalam mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan tindak perusakan sebagai suatu yang dia pahami atau justru dia tidak paham. Jika dia memahami yang dilakukannya serta mengerti mengenai konsekuensi yang ditimbulkan, maka dosen dapat menciptakan nuansa perdebatan untuk menguji argumentasi mahasiswa tersebut, namun jika mahasiswa tersebut tidak paham atas apa yang dilakukannya serta konsekuensi yang ditimbulkannya, maka dosen cukup memberikan penekanan saja bahwa tindakan seperti itu tidaklah benar dan tidak boleh dilakukan. Sardiman (2011), menerangkan bahwa partisipasi dapat terlihat aktifitas fisiknya, yang dimaksud adalah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain, ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau pasif.

Ketiga adalah membuat program pembelajaran secara khusus yang dikaitkan dengan materi perkuliahan. Program tersebut harus berupa pembelajaran interaktif, dimana dosen dan/atau mahasiswa bukan hanya berdiskusi secara verbal saja, namun juga banyak menampilkan video-video serta dampak-dampak dari demonstrasi yang bersifat anarkis yakni ditandai dengan pengrusakan fasilitas umum serta penggunaan kata-kata yang tidak baik. Dengan begitu maka diharapkan para aktivis mahasiswa yang pernah melakukan atau berpotensi melakukan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dirubah cara berpikir dan bertindaknya. Dengan demikian merancang pembelajaran menjadi kata kunci langkah ini, dimana teknologi

instruksional sebagai sumber-sumber yang disusun terlebih dahulu dalam proses desain atau pemilihan dan pemanfaatan bahan ajar yang dikombinasikan menjadi sistem instruksional yang lengkap untuk mewujudkan terlaksananya proses belajar yang bertujuan dan terkontrol (Muslimin, 2017).

KESIMPULAN

Hasil Penelitian ini menghasilkan setidaknya tiga kesimpulan utama. Pertama bahwa faktor yang mempengaruhi aktivis mahasiswa dalam melakukan demonstrasi yang diwarnai dengan pengrusakan fasilitas umum atau fasilitas negara terdiri atas faktor internal yakni pengetahuan yang minim serta kesadaran yang rendah tentang pelaksanaan demonstrasi yang baik, didikan beberapa senior yang kurang tepat sehingga menganggap rusuh saat berdemonstrasi menunjukkan keberanian masa aksi serta adanya provokasi dari pihak luar sehingga membuat demonstrasi yang direncanakan aman menjadi kacau. Faktor lain yang cukup mempengaruhi adalah menurunnya kepercayaan aktifis mahasiswa terhadap pemerintah.

Kedua bahwa dalam melakukan internalisasi nilai dan moral terhadap para aktivis mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah optimalisasi peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dinilai layak sebagai sarana internalisasi karena memiliki muatan materi yang sangat sesuai dengan kehidupan yang demokratis, sehingga tidak perlu dibuat program khusus dengan merancang kurikulum khusus untuk memperbaiki karakter mahasiswa yang terlibat atau

berpotensi melakukan demonstrasi anarkis., namun cukup dengan mengembangkan model, metode dan strategi mengajar PKn di perguruan tinggi.

Ketiga, keharusan dosen untuk mengetahui mana saja aktivis mahasiswa yang terlibat tindak pengrusakan atau menggunakan kata-kata kasar saat berdemonstrasi atau mahasiswa yang berpotensi melakukan hal yang sama merupakan salah satu kunci keberhasilan peranan mata kuliah PKN dalam membina karakter aktivis mahasiswa pada khususnya yang demikian, karena setelah memenuhi syarat tersebut, dosen dapat melibatkan para aktivis mahasiswa itu dalam berdiskusi, memainkan peran dalam bab demokrasi serta melakukan klarifikasi nilai sebagai upaya dekonstruksi atas sikap anarkisme yang dimilikinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Cahyono, H. (2008). Agen. *ADLFI. Archéologie de La France - Informations*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.4000/adlfi.2398>
- Cholisin. (2000). *IKN-PKN*. Universitas Terbuka.
- Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa Di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1), 32–43.
- Cholisin. (2000). *IKN-PKN*. Universitas Terbuka.
- Jiwandono, I. S. (2020). Dinamika Sosial Sikap Narcisstic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=aafOTboAAAAJ&citation_for_v

iew=aafOTboAAAAJ:zYLM7Y9cA
GgC

- Kapri, U. C., & Rani, N. (2014). Emotional Maturity: Characteristic and Levels. *International Journal of Technological Exploration and Learning (IJTEL)*, 3(1). <https://archive.org/details/Httpijtel.orgv3n1359-361CRP0301P22.pdf>
- Moh. Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muslimin, M. & K. (2017). *Teknologi Pendidikan Penerapan Pembelajaran Yang Sistematis*. Pustaka Pelajar.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Santoso, T. (2002). *Teori-teori Kekerasan*. Ghalia.
- Sardiman, A. M. (2011). *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Rajawali Pers.
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Siallagan, D. (2011). *Fungsi dan Peranan Mahasiswa*. www.academia.edu, diakses pada